

Warga Burangkeng Tuntut Kompensasi Sampah

Seluruh tuntutan warga yang disampaikan sudah dibahas oleh Bappeda

BEKASI – Warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, menuntut dana kompensasi sampah kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pasalnya, sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng diresmikan 2001 silam, warga tak pernah mendapat bantuan pemerintah. Akibatnya warga setempat menutup jalan masuk ke TPA Burangkeng, Rabu (13/2). Penutupan membuat ratusan armada truk sampah tak bisa melintas selama satu hari penuh.

“Kita minta ada perhatian khusus,” kata Aep, salah satu warga. Kompensasi yang diminta warga berupa perbaikan jalan, saluran air, sumur artesis, dan penerangan jalan. Beberapa warga lain yang tinggal di sekitar TPA juga mengeluhkan bau busuk sampah. Masyarakat juga mengeluhkan air yang tercemar. Padahal, air tersebut digunakan warga untuk kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, memasak, dan mandi. Pen-

cemaran air dikhawatirkan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan warga.

Aep mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan PSDA, Bappeda, dan Dinas Sosial Bekasi untuk renovasi jalan masuk TPA Burangkeng. Surat juga sudah dibuat tembusan kepada Plt Bupati Kabupaten Bekasi, tetapi belum mendapat tanggapan. Warga mengeluh Pemkab Bekasi tidak memperhatikan hajat hidup mereka yang tinggal di lingkungan sampah. “Kami merasa kecewa dengan sikap pemerintah,” ujarnya.

Kepala Desa Burangkeng Nemin menegaskan, Pemkab Bekasi dinilai tidak memberikan perhatian kepada warga Desa Burangkeng.

“Bukan minim perhatian lagi, tetapi benar tidak diperhatikan,” katanya. Padahal, TPA Burangkeng sudah sejak lama berdiri, tetapi pemerintah tidak memperhatikan tuntutan yang diminta warga. Hal ini jauh berbeda dengan warga Bantar Gebang yang rutin dapat kompensasi.

Nemin menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 500 kepala keluarga atau 12 ribu penduduk yang terdampak TPA Burangkeng. Jumlah ini cukup besar mengingat dampak buruk

dari TPA yang tidak bisa disepelekan. Ia mengaku bosan mengajukan bantuan kepada Pemkab Bekasi karena tak pernah mendapat persetujuan. Padahal, pemberian kompensasi merupakan kewajiban pemerintah kepada warga yang terdampak.

Menurut dia, Desa Burangkeng terakhir kali mendapat bantuan sebesar Rp 7 miliar dari Pemkab Bekasi untuk pembangunan infrastruktur pada 2013.

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan beton yang sebelumnya sebatas tanah. Berdasarkan kesepakatan seharusnya Desa Burangkeng mendapat alokasi dana pembangunan sebesar Rp 5 miliar setiap tahun.

Namun, hingga kini janji itu tidak direalisasikan. Saat ini, Desa Burangkeng hanya menerima alokasi dana yang umum diterima desa lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD TPA Burangkeng Maulan mengaku penutupan jalan akses masuk sudah sering terjadi. “Biasanya warga secara tiba-tiba langsung menutup ketika ada tuntutan yang tidak dipenuhi,” kata Maulan. Saat ini, langkah yang bisa dilakukan ketika warga marah hanya upaya persuasif. Setelah upaya persuasif dilakukan, bi-

asanya warga akan kembali membuka jalan.

Maulan mengatakan, total luas area TPA Burangkeng mencapai 11,6 hektare. Adapun kapasitas TPA sudah overload sejak 2014 silam. Meski demikian, perluasan tak bisa dilakukan akibat terbentur oleh rencana tata ruang wilayah (RTRW). Para pemilik lahan kosong di sekitar TPA Burangkeng sudah menyetujui untuk menjualnya, tetapi Pemkab Bekasi terhambat oleh regulasi yang disusun sendiri.

Sementara, Kepala Bidang Kebersihan DLH Kabupaten Bekasi Dodi Agus Suprianto mengatakan, seluruh tuntutan warga yang disampaikan sudah dibahas oleh Bappeda. “Saya minta warga bersabar menunggu,” kata Dodi. Pemkab Bekasi tengah menindaklanjuti permintaan tersebut.

Kemudian terkait dana kompensasi, Dodi mengakui bahwa memang belum masuk ke dalam APBD Kabupaten Bekasi karena keterbatasan dana. Anggaran kompensasi harus dibuat terorganisasi berdasarkan data warga yang terkena dampak dari TPA Burangkeng. Dodi menambahkan, kompensasi bisa segera diperoleh warga mengingat dampak negatif dari TPA Burangkeng.